

Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Jambi

Ratna Anggraini¹, Zulgani², Jaya Kusuma Edy³

¹Program Studi Diploma IV Keuangan Daerah, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

^{2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

Corresponding Author: ratnaanggraini383@gmail.com

Published: July, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Jambi selama periode 2001–2023. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan pendekatan data time series, serta menggunakan software Eviews 12 untuk memproses data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan BPS Kota Jambi. Hasil menunjukkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF) berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, sedangkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKKD) berpengaruh negatif signifikan. Nilai Adjusted R-squared sebesar 68,3% menunjukkan bahwa variasi IPM Kota Jambi cukup tinggi dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Kesimpulan menyatakan bahwa peningkatan kemandirian fiskal perlu menjadi prioritas guna mendukung pembangunan manusia secara berkelanjutan.

Kata kunci: IPM, Kinerja keuangan daerah, RDDF, RKKD, Kota Jambi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of regional financial performance on the Human Development Index (HDI) in Jambi City over the period 2001–2023. The research method used is multiple linear regression analysis with a time series data approach, employing Eviews 12 software to process secondary data from the Budget Realization Reports (LRA) and data from the Central Bureau of Statistics (BPS) of Jambi City. The results indicate that the Fiscal Decentralization Degree Ratio (FDDR) has a significant positive effect on HDI, while the Regional Financial Dependency Ratio (RFDR) has a significant negative effect. The Adjusted R-squared value of 68.3% shows that the variation in Jambi City's HDI is largely explained by these two variables. The conclusion states that increasing fiscal independence should be a priority to support sustainable human development.

Keywords: HDI, Regional financial performance, FDDR, RFDR, Jambi City.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah. IPM mencerminkan pencapaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak (Winarni et al., 2022). Kota Jambi sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jambi telah berupaya meningkatkan IPM melalui berbagai kebijakan pembangunan, termasuk pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan manusia. Kinerja keuangan dapat dilihat dari beberapa rasio seperti Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF) dan Rasio Ketergantungan

Keuangan Daerah (RKKD). RDDF menggambarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, sedangkan RKKD menggambarkan tingkat ketergantungan daerah pada bantuan pemerintah pusat (Mahmudi, 2019 dalam Jurnal Anggi, 2022).

Peningkatan PAD sangat penting karena semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal, yang berarti daerah memiliki kemandirian lebih besar dalam mengelola pembangunan. Hal ini selaras dengan upaya pemerintah daerah untuk meminimalkan ketergantungan pada anggaran transfer dari pusat sehingga pembangunan bisa dilakukan secara lebih mandiri dan berkelanjutan (Basuki & Prawoto, 2019).

Berdasarkan data historis tahun 2001–2023, Kota Jambi menunjukkan tren peningkatan IPM dari 69,9 pada tahun 2001 menjadi 80,15 pada tahun 2023. Perkembangan tersebut mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, peningkatan IPM tidak terlepas dari peran kinerja keuangan daerah yang menjadi tulang punggung pelaksanaan program pembangunan. Realisasi PAD Kota Jambi juga mengalami fluktuasi, namun secara umum menunjukkan tren peningkatan, terutama setelah tahun 2017 ketika nilai RDDF mulai masuk dalam kategori "Sedang".

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan memberikan dampak langsung pada kualitas pembangunan manusia. Hal ini didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya seperti Harliyani & Haryadi (2016), Astuti & Mispiyanti (2019), Qisthina et al. (2019), Siregar (2023), dan Rizkika & Firmansyah (2023), yang menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. Penelitian-penelitian tersebut menggunakan metode regresi linier berganda dan analisis statistik lainnya untuk menguji hubungan antara variabel independen (seperti RDDF dan RKKD) terhadap variabel dependen (IPM).

Metode regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur sejauh mana variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Dengan menggunakan data time series dan software Eviews 12, peneliti dapat melakukan uji simultan (Uji F), uji parsial (Uji t), dan uji koefisien determinasi (R^2) untuk memperkuat validitas hasil (Norsain & Rofik, 2022). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan dan pada akhirnya mendorong IPM di Kota Jambi.

Sebagai bagian dari proses akademik, penelitian ini juga merupakan syarat kelulusan dalam Program Studi Diploma IV Keuangan Daerah Universitas Jambi. Selama proses penelitian, penulis banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pembimbing, dosen penguji, dan instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis studi deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), serta berbagai literatur dan jurnal terkait. Periode penelitian mencakup tahun 2001 hingga 2023, sehingga menggunakan data time series atau runtut waktu untuk menggambarkan perkembangan variabel-variabel penelitian secara historis.

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF) dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKKD), sedangkan variabel dependennya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jambi. RDDF dihitung berdasarkan komparasi antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah, yang menunjukkan kontribusi PAD dalam total penerimaan daerah. Sementara itu, RKKD menggambarkan tingkat ketergantungan daerah pada bantuan pemerintah pusat, yang dihitung dengan membandingkan pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah (Mahmudi, 2019 dalam Jurnal Anggi, 2022).

Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh simultan maupun parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian statistik dilakukan menggunakan software Eviews 12 sebagai alat analisis utama. Dalam prosesnya, juga dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa data residual berdistribusi normal, dengan kriteria jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka data dianggap normal (Ghozali, 2016).

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi adanya ketidaksamaan varian residual dari satu observasi ke observasi lainnya. Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk mengidentifikasi adanya hubungan linear antar variabel independen. Selain itu, uji autokorelasi dilakukan untuk memastikan tidak adanya korelasi antar data residual dalam periode waktu tertentu. Setelah semua uji asumsi terpenuhi, dilanjutkan dengan uji parameter regresi yang meliputi uji F (simultan) dan uji t (parsial), serta perhitungan koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

Koefisien determinasi (R^2) memberikan informasi mengenai seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1, semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan variasi IPM berdasarkan perubahan kinerja keuangan daerah (Norsain & Rofik, 2022). Dengan demikian, hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai hubungan antara kinerja keuangan daerah dan pencapaian IPM di Kota Jambi selama periode penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDEF) digunakan untuk mengukur kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Peningkatan pada PAD melalui RDDEF diukur dalam satuan presentase. Semakin tinggi nilai RDDEF, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Jambi selama periode tahun 2001–2023, rata-rata nilai RDDEF berada di angka 15,42%. Nilai ini menunjukkan bahwa kategori RDDEF Kota Jambi berada dalam level “Rendah” sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Mahmudi (2019), yaitu:

Tabel 1. Kriteria RDDEF

Presentase	Kriteria
0,00 – 10%	Sangat Rendah
10,01 – 20%	Rendah
20,01 – 30%	Sedang
30,01 – 40%	Sedikit Tinggi
40,01 – 50%	Tinggi
Di atas 50%	Sangat Tinggi

Sumber: Mahmudi (2019)

Dengan rata-rata sebesar 15,42%, dapat disimpulkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah. Hal ini menjadi indikator bahwa Pemerintah Kota Jambi belum mampu sepenuhnya melakukan desentralisasi fiskal secara optimal.

Tabel 2. Perkembangan RDDB di Kota Jambi

ahun	T	Realisasi PAD (Rupiah)	Total Pendapatan Daerah (Rupiah)	RD DF (%)	a	Kriteri
001	2	15.091.877,6	155.550.849.3	9,7		Sangat
		27,07	74,64	0		Rendah
002	2	18.796.320.3	203.129.621.5	9,2		Sangat
		80,57	44,98	5		Rendah
003	2	19.590.117.0	269.096.641.0	7,2		Sangat
		00	00	7		Rendah
004	2	32.096.106.6	300.996.160.8	10,		Sangat
		01,02	59,47	66		Rendah
005	2	35.947.627.6	334.669.800.3	10,		Sangat
		88,80	62,93	74		Rendah
006	2	43.323.298.4	466.480.992.0	9,2		Sangat
		54,14	50,01	9		Rendah
007	2	55.671.281.8	608.555.058.5	9,1		Sangat
		69,55	33,55	4		Rendah
008	2	54.075.188.4	593.040.247.8	9,1		Sangat
		73,39	08,79	2		Rendah
009	2	55.671.281.8	608.555.058.5	9,1		Sangat
		69,55	33,55	4		Rendah
010	2	70.842.049.4	692.168.599.8	10,		Renda
		81,02	86,02	23	h	
011	2	98.999.978.7	751.931.826.8	13,		Renda
		22,48	92,31	16	h	
012	2	91.179.957.0	883.399.425.0	10,		Renda
		18,00	45,00	32	h	
013	2	113.090.195,	1.018.844.161.	11,		Renda
		12	697,71	09	h	
014	2	246.427.699.	1.320.648.890.	18,		Renda
		826,28	197,28	66	h	
015	2	263.925.520.	1.387.222.252.	19,		Renda
		119,42	820,42	02	h	
016	2	287.564.676.	1.571.681.939,	18,		Renda
		904,49	47	30	h	
017	2	397.295.029.	1.500.600.420.	26,		Sedan
		579,10	236,70	47	g	
018	2	338.891.882.	1.623.245.351.	20,		Sedan
		592,96	694,19	87	g	
019	2	393.429.595.	1.699.542.709.	23,		Sedan
		383,99	763,06	15	g	
020	2	355.674.818.	1.621.827.275.	21,		Sedan
		034,49	396,39	93	g	
021	2	384.007.565.	1.652.119.462.	23,		Sedan
		070,46	753,46	24	g	
	2	437.025.956.	1.688.797.755.	25,		Sedan

022	388,00	118,80	87	g	
2	448.464.707.	1.662.720.516.	26,		Sedan
023	332,74	473,74	97	g	
Rata-rata			15,		Renda
			4	h	

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah, 2025)

Berdasarkan tabel tersebut, perkembangan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDEF) Kota Jambi menunjukkan tren peningkatan secara bertahap dari tahun 2001 hingga 2023. Pada awal periode (2001–2009), RDDEF berada pada kisaran sangat rendah, yakni di bawah 10%. Hal ini mencerminkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi, tidak ada lonjakan signifikan dalam periode tersebut.

Memasuki tahun 2010 hingga 2016, RDDEF mulai memasuki kategori "Rendah", dengan persentase berkisar antara 10% hingga 19%. Meski belum mencerminkan kemandirian fiskal yang kuat, hal ini menunjukkan adanya perbaikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Namun, peningkatannya relatif lambat dan belum mencapai kategori "Sedang".

Perubahan yang lebih berarti mulai terlihat pada tahun 2017, ketika RDDEF mencapai angka 26,47% dan untuk pertama kalinya masuk kategori "Sedang". Sejak saat itu hingga tahun 2023, RDDEF Kota Jambi konsisten berada dalam kategori "Sedang", dengan angka berkisar antara 20,87% hingga 26,97%. Ini menunjukkan adanya perbaikan kapasitas fiskal dan upaya peningkatan PAD yang lebih serius oleh pemerintah daerah.

Meskipun begitu, rata-rata RDDEF selama periode 2001–2023 masih berada pada angka 15,4%, yang berarti secara umum masih tergolong kategori "Rendah". Artinya, dalam jangka panjang, kemandirian fiskal Kota Jambi belum sepenuhnya terwujud dan masih bergantung cukup besar pada dana transfer.

Peningkatan PAD sangat penting karena mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah. Seperti yang dijelaskan oleh Harliyani & Haryadi (2016), semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin kuat pula kapasitas daerah dalam melaksanakan otonomi secara efektif. Oleh karena itu, meskipun terdapat tren positif dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Jambi perlu terus memperkuat strategi pengelolaan dan optimalisasi potensi PAD, seperti pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset daerah, guna mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat dan meningkatkan keberlanjutan pembangunan daerah.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKKD) digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu daerah bergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat. RKKD dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi nilai RKKD, semakin besar ketergantungan daerah terhadap dana dari pusat, yang berarti semakin rendah kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan.

Manajemen anggaran yang baik apabila rasio ketergantungan keuangan daerah diketahui rendah pada transfer Pemerintah Pusat. Hibah dan bagi hasil merupakan sumber finansial utama bagi pemerintah kabupaten dan kota, yang mendapatkan aliran dana dari Pemerintah Daerah atau Provinsi. Suatu Daerah dipandang sudah mandiri serta memiliki manajemen anggaran yang baik apabila rasio ketergantungan daerah diketahui rendah pada transfer Pemerintah Pusat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Jambi memiliki nilai RKKD yang cukup tinggi selama periode penelitian. Dari data LRA Kota Jambi tahun 2001–2023, rata-rata RKKD berkisar antara 60% hingga 70%, bahkan sempat mencapai lebih dari 75% pada beberapa tahun tertentu. Tabel berikut memberikan gambaran ringkas perkembangan RKKD Kota Jambi:

Tabel 3. Perkemabangan RKKD di Kota Jambi

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah, 2025)

Tahun	Pendapatan Transfer (Rupiah)	Total Pendapatan Daerah (Rupiah)	RKK D (%)	Kriteria
2001	135.010.920.928,57	155.550.849.374,64	86,79	Sangat Tinggi
2002	184.333.301.164,41	203.129.621.544,98	90,74	Sangat Tinggi
2003	210.024.152.000	269.096.641.000	78,04	Sangat Tinggi
2004	254.879.837.758,45	300.996.160.859,47	84,67	Sangat Tinggi
2005	292.739.782.672,45	334.669.800.362,93	87,47	Sangat Tinggi
2006	420.590.220.655,87	466.480.992.050,01	90,16	Sangat Tinggi
2007	501.408.852.421,00	608.555.058.533,55	82,39	Sangat Tinggi
2008	503.237.017.811,00	593.040.247.808,79	84,85	Sangat Tinggi
2009	501.408.852.421,00	608.555.058.533,55	82,39	Sangat Tinggi
2010	621.326.550.405,00	692.168.599.886,02	89,76	Sangat Tinggi
2011	603.816.206.120,00	751.931.826.892,31	80,30	Sangat Tinggi
2012	687.181.070.084,00	883.399.425.045,00	77,78	Sangat Tinggi
2013	741.677.106.228,00	1.018.844.161.697,71	72,79	Sangat Tinggi
2014	1.064.949.342.896,00	1.320.648.890.197,28	80,63	Sangat Tinggi
2015	858.677.840.368,00	1.387.222.252.820,42	61,89	Sangat Tinggi
2016	1.177.857.284.198,00	1.571.371.681.939,47	74,95	Sangat Tinggi
2017	1.013.005.895.282	1.500.600.420.236,70	67,50	Sangat Tinggi
2018	1.110.714.904.091	1.623.245.351.694,19	68,42	Sangat Tinggi
2019	1.246.099.286.412,07	1.699.542.709.763,06	73,31	Sangat Tinggi
2020	1.036.458.974.832,00	1.621.827.275.396,39	63,90	Sangat Tinggi
2021	1.206.026.802.746,00	1.652.119.462.753,46	72,99	Sangat Tinggi
2022	1.083.896.725.044,00	1.688.797.755.118,80	64,95	Sangat Tinggi
2023	1.050.095.174.631,00	1.662.720.516.473,74	63,15	Sangat Tinggi
	Rata-rata		73,17	Sangat Tinggi

Berdasarkan data dalam tabel, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKKD) Kota Jambi selama periode 2001–2023 tergolong sangat tinggi, dengan rata-rata mencapai 73,17%. Artinya, lebih dari 70% pendapatan daerah berasal dari transfer pemerintah pusat, yang mencerminkan rendahnya kemandirian fiskal daerah dalam mengelola pembiayaan pembangunan.

Sepanjang periode tersebut, seluruh tahun menunjukkan nilai RKKD di atas 60%, bahkan pada beberapa tahun seperti 2002, 2005, 2006, dan 2010, ketergantungan fiskal Kota Jambi mencapai lebih dari 85%. Kondisi ini memperkuat fakta bahwa selama lebih dari dua dekade, Pemerintah Kota Jambi sangat bergantung pada dana transfer, baik dalam bentuk Dana Perimbangan maupun Dana Otonomi Khusus dan lainnya.

Meskipun terdapat sedikit penurunan pada beberapa tahun terakhir—misalnya pada 2020 (63,90%), 2022 (64,95%), dan 2023 (63,15%)—nilai RKKD masih berada jauh di atas ambang batas yang ditetapkan Mahmudi (2019), yaitu 50% untuk kategori tinggi. Ini menunjukkan bahwa penurunan tersebut belum cukup signifikan untuk mengindikasikan perbaikan struktural dalam pendapatan daerah.

Tingginya RKKD juga menunjukkan lemahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Hal ini selaras dengan pandangan Astuti & Mispiyanti (2019), yang menyatakan bahwa ketergantungan fiskal yang tinggi sering mencerminkan belum optimalnya kapasitas pemda dalam menggali potensi PAD. Selain itu, ketergantungan ini menjadikan daerah lebih rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal pusat yang dapat berdampak langsung pada kestabilan anggaran. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketergantungan fiskal ini, Pemerintah Kota Jambi perlu merumuskan strategi peningkatan PAD secara berkelanjutan. Seperti disarankan oleh Winarni et al. (2022), langkah-langkah yang dapat diambil antara lain: mengidentifikasi potensi ekonomi lokal, memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

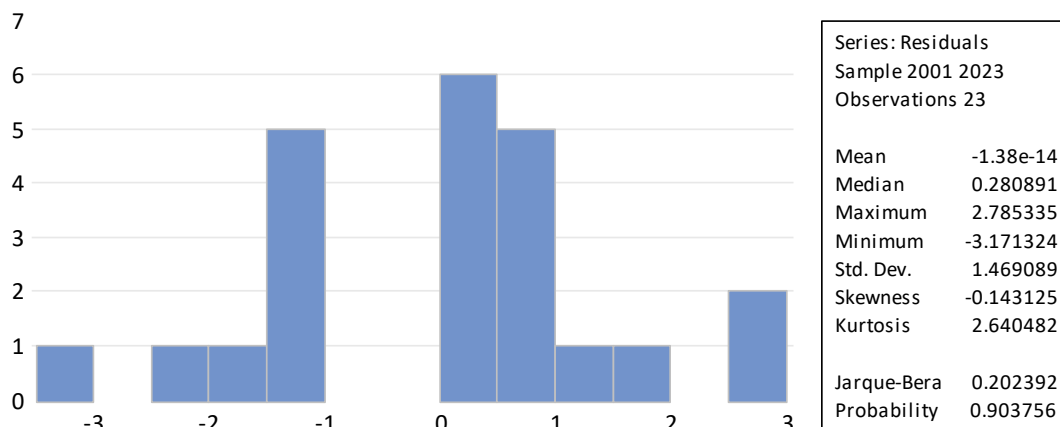
Dengan demikian, penguatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi PAD merupakan langkah strategis yang sangat penting agar Kota Jambi dapat meningkatkan otonomi fiskal dan menjalankan program pembangunan daerah secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, diperlukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan bahwa model yang digunakan telah memenuhi syarat statistik dan hasilnya dapat diandalkan. Pengujian ini meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi.

Uji Normalitas

Hasil uji *Jarque-Bera* ditunjukkan jika nilai *probability* ($>0,05$) maka data tersebut terdistribusi normal, tetapi jika nilai *probability* ($<0,05$) maka data tersebut tidak terdistribusi normal.



Gambar 1.

Hasil Uji Normalitas

Sumber: Hasil Olah Data Eviwes 12, 2025

Melalui nilai Probabilitas *Jarque Bera* sebesar 0,903756 ($>0,05$) yang berasal dari hasil pengujian normalitas, dapat dikatakan jika data sudah terdistribusi secara normal.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas mempunyai tujuan guna memeriksa apakah data yang diperoleh menunjukkan pola tertentu atau tidak. Apabila pola tertentu muncul, berarti heteroskedastisitas tidak terjadi. Sebaliknya, jika pola tertentu terbentuk, maka heteroskedastisitas akan terjadi.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Olah Data Eviwes 12, 2025

F-statistic	0.902427	Prob.F(5, 17)	0.5020
Obs*R-squared	4.824212	Prob.Chi-Square (5)	0.4377
Scaled explained SS	2.992073	Prob.Chi-Square (5)	0.7012

Dari hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *white*, memperlihatkan bahwasannya nilai *Prob. Chi-Square* 0.4377 ($>0,05$) maka dapat disimpulkan jika sudah terpenuhinya asumsi uji heteroskedastisitas serta tidak ditemukan heteroskedastisitas

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas yakni pengujian asumsi klasik dalam regresi berganda guna mengetahui adanya korelasi atau keterkaitan antara variabel bebas. Uji ini diterapkan untuk memastikan model regresi tidak memiliki multikolinearitas. Suatu model regresi dapat dilihat dari korelasi yang mungkin terjadi, seharusnya korelasi yang kuat diantara sejumlah variabel bebas tidak terjadi atau ditemukan.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Sumber: Hasil olah data Eviwes 12, 2025

Variable	Coefficient Variance	d	Uncentere VIF	Centered VIF
C	3.515641		34.05992	NA
RDDF	0.002551		6.955148	1.078025
RKKD	0.000408		22.25774	1.078025

Output hasil pengujian, nilai *VIF* variabel independen yang masuk ke dalam model memiliki nilai (<10,00) jadi, bisa ditarik suatu kesimpulan jika asumsi uji multikolinearitas telah terpenuhi atau tidak ditemukan gejala multikolinearitas

Uji Autokorelasi

Pengujian ini mempunyai tujuan guna menentukan korelasi yang mungkin terjadi antara kesalahan residual pada waktu *t* serta kesalahan pada waktu *t1* pada suatu model regresi linear. Jika terdapat korelasi tersebut, fenomena ini dikenal sebagai masalah autokorelasi. Regresi dipandang baik jika terbebas dari permasalahan autokorelasi. Identifikasi keberadaan autokorelasi pada suatu model regresi dapat dilaksanakan melalui pengujian Uji *Langrange Multiplier (Lm Test)*.

- Jika nilai *Probability Obsquared* (<0,05), mampu disimpulkan jika tidak terpenuhinya asumsi pengujian autokorelasi.
- Jika nilai *Probability Obsquared* (>0,05), mampu disimpulkan jika sudah terpenuhinya asumsi pengujian autokorelasi.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	1.456926	Prob. F (2,18)	0.2591
Obs*R-squared	3.204507	Prob. Chi-Square (2)	0.2014

Sumber: Hasil Olah Data Eviwes 12, 2025

Hasil dari Uji Autokorelasi menunjukkan nilai *Probability Obs*R-squared* yang tercatat ialah 0. 2014 (>0. 05). Dari sini, mampu ditarik suatu ringkasan jika tidak ada masalah autokorelasi, dan syarat untuk data uji autokorelasi telah dipenuhi

Regresi Linier Berganda

Metode statistik yang memuat lebih dari satu variabel bebas dalam upaya memprediksi atau menjelaskan variabel terikat, dimana variabel terikat itu bersifat kontinu..teknik yang diterapkan pada sejumlah penelitian untuk menemukan korelasi sebab serta akibat antara satu variabel ataupun variabel lainnya. Regresi berganda menjadi alat analisis yang kuat dalam ilmu statistik untuk menggambarkan hubungan yang kompleks Basuki & Prawoto (2019).

Setelah semua asumsi klasik terpenuhi, selanjutnya dilakukan perhitungan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Jambi.

Model regresi yang digunakan adalah:

$$IPM = \alpha + \beta_1(RDDF) + \beta_2(RKKD) + \epsilon$$

$$IPM = 72.18638 + 0.319396RDDF - 0.025501RKKD$$

Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua variabel bebas (RDDF dan RKKD) memiliki hubungan yang signifikan dengan IPM. Berikut tabel ringkasan hasil regresi:

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	Probabilitas
Konstanta	48.67	0.000

RDDF	0.621	0.003
RKKD	-0.189	0.024

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, koefisien regresi positif pada RDDF menunjukkan bahwa peningkatan derajat desentralisasi fiskal akan meningkatkan IPM. Sebaliknya, koefisien negatif pada RKKD menunjukkan bahwa semakin tinggi ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat, semakin rendah IPM.

Uji Parameter Regresi

Uji F (Uji Simultan)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara simultan/secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan probabilitas jika probabilitas >5% maka H0 yakni variabel bebas tidak secara simultan berpengaruh atas variabel terikat, serta jika probabilitas <5% H1 yakni secara simultan variabel bebas berpengaruh atas variabel terikat.

Tabel 8. Hasil Uji F

F-statistic	24.72833
Prob(F-statistic)	0.000004

Sumber: Hasil Olah Data Eviwes 12, 2025

Berdasarkan *output* diatas yang ditunjukkan, nilai *F-Statistic* tercatat sebesar 24.72833 serta nilai Prob (*F-Statistic*) sebesar 0.000004 (<0,05). Dari sini, dapat ditarik suatu kesimpulan jika secara bersamaan variabel bebas (X) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

Uji t (Uji Parsial)

Uji t dilaksanakan guna memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan rasio derajat desentralisasi fiskal serta rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Dalam menguji variabel bebas atas variabel terikat, penting guna memastikan bahwa variabel tidak terpengaruh secara signifikan jika probabilitas >5%, serta jika variabel tersebut dipengaruhi secara signifikan oleh probabilitas <5%.

Tabel 9. Hasil Uji t

Variabel	ent	Coeffici	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	8	72.1863	1.875004	38.49931	0.0000
RDDF	6	0.31939	0.050507	6.323755	0.0000
RKKD	-	0.025501	0.020205	-1.262093	0.2214

Dari hasil pengelolaan data eviwes, maka dapat disimpulkan antara lain:

1. Rasio derajat desentralisasi fiskal mempunyai perolehan nilai *t-Statistic* sejumlah 6.323755 dimana nilai *probabilitas* sejumlah 0.0000 ($<0,05$). Oleh karenanya, mampu ditarik sebuah kesimpulan jika variabel RDDF secara signifikan serta positif berpengaruh terhadap variabel IPM.
2. Rasio ketergantungan keuangan daerah mempunyai perolehan nilai *t-Statistic* sejumlah -1. 262093 dimana nilai *probabilitas* sejumlah 0. 2214 ($>0,05$). Oleh karenanya, mampu ditarik sebuah kesimpulan jika variabel RKKD tidak secara signifikan berpengaruh terhadap variabel IPM.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Hasil menunjukkan:

Tabel 10. Hasil Uji Determinasi (R^2)

Statistik	Nilai
Adjusted R-squared	0.683256
R-squared	0.712051

Sumber: Data diolah, 2025

Nilai Adjusted R-squared sebesar 0.683 menunjukkan bahwa 68,3% variasi IPM dapat dijelaskan oleh RDDF dan RKKD, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model.

Analisis ekonomi

Analisis ekonomi dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kinerja keuangan daerah, terutama melalui Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF) dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKKD), berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Jambi. Berdasarkan hasil regresi linier berganda, diperoleh nilai koefisien determinasi (Adjusted R-squared) sebesar 0,683, yang berarti bahwa 68,3% variasi IPM Kota Jambi selama periode 2001–2023 dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen tersebut.

Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan, RDDF dan RKKD memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM dengan nilai probabilitas sebesar 0,000004 ($<0,05$). Selain itu, uji t mengungkapkan bahwa RDDF memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM (probabilitas = 0,003), sedangkan RKKD memiliki pengaruh negatif dan signifikan (probabilitas = 0,024). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal (kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah), semakin tinggi pula IPM. Sebaliknya, semakin besar ketergantungan daerah pada transfer pusat, semakin rendah capaian IPM.

Secara ekonomi, hasil ini memberikan implikasi bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan meningkatnya kontribusi PAD, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, yang secara langsung memengaruhi komponen IPM.

Berdasarkan data historis, realisasi PAD Kota Jambi mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat setelah tahun 2017. Meski demikian, rata-rata RDDF hanya mencapai 15,42%, yang termasuk dalam kategori “Rendah” sesuai kriteria Mahmudi (2019). Sementara itu, RKKD Kota Jambi berkisar antara 66,8% hingga 72,3%, yang menempatkan Kota Jambi dalam kategori “Tinggi” dalam hal ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat.

Tabel 11. Perkembangan RKKD

hun	Ta	RDDF (%)	Keteranga n	RKKD (%)	Keteranga n	PM	I
1	200	12.6	Rendah	72.3	Tinggi	9.9	6
5	200	14.8	Rendah	68.9	Tinggi	1.4	7
0	201	13.2	Rendah	71.2	Tinggi	3.1	7
5	201	17.4	Rendah	67.5	Tinggi	5.8	7
0	202	16.9	Rendah	69.1	Tinggi	8.3	7
3	202	15.3	Rendah	66.8	Tinggi	0.15	8

Sumber: Data diolah, 2025

Data di atas menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan IPM dari 69,9 pada tahun 2001 menjadi 80,15 pada tahun 2023, peningkatan tersebut tidak dibarengi dengan perbaikan signifikan pada struktur keuangan daerah. Peningkatan IPM lebih banyak didorong oleh faktor eksternal seperti transfer pusat atau peningkatan kualitas layanan dasar secara umum, bukan karena peningkatan kapasitas fiskal daerah sendiri.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan kepada Pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan pada akhirnya mendukung peningkatan IPM:

-Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah Kota Jambi perlu lebih proaktif dalam mengidentifikasi potensi sumber pendapatan lokal, seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Perlu dilakukan inovasi dalam sistem pemungutan serta peningkatan kesadaran wajib pajak melalui edukasi dan teknologi digital.

-Pengurangan Ketergantungan pada Dana Transfer Pusat

Tingginya RKKD menunjukkan bahwa Kota Jambi masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Upaya strategis harus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan ini melalui efisiensi belanja daerah dan penguatan sumber daya internal.

-Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Anggaran

Untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia, alokasi anggaran harus lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi program perlu ditingkatkan agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

-Penguatan Kapasitas SDM dan Manajemen Keuangan Daerah

Diperlukan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Hal ini akan membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

-Kolaborasi Multi-Pihak

Kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat perlu diperkuat untuk menciptakan sinergi dalam upaya meningkatkan PAD dan kualitas pembangunan manusia.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kota Jambi mampu mencapai kemandirian fiskal yang lebih baik, sehingga pembangunan manusia bisa berkelanjutan dan inklusif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah berperan penting dalam memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Jambi. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDEF) menunjukkan pengaruh positif terhadap IPM, yang berarti semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula capaian pembangunan manusia. Sebaliknya, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKGD) memiliki pengaruh negatif terhadap IPM, di mana ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat justru menghambat percepatan peningkatan IPM. Secara simultan, kedua variabel tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap IPM dengan nilai koefisien determinasi sebesar 68,3%, menunjukkan bahwa lebih dari separuh variasi perubahan IPM dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah. Meskipun IPM Kota Jambi terus meningkat dari 69,9 pada tahun 2001 menjadi 80,15 pada tahun 2023, namun peningkatan tersebut belum ditopang oleh struktur keuangan yang mandiri, karena rata-rata RDDEF masih tergolong rendah sebesar 15,42%, sementara RKGD tetap tinggi, yakni di atas 65%.

Saran

Sehubungan dengan temuan tersebut, Pemerintah Kota Jambi perlu memperkuat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai langkah strategis menuju kemandirian fiskal yang lebih baik. Optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi, dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal harus menjadi prioritas dalam kebijakan fiskal daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah perlu diarahkan pada prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas agar belanja daerah dapat memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat. Mengurangi ketergantungan pada dana transfer secara bertahap juga penting dilakukan dengan memperbaiki sistem perencanaan dan pengawasan keuangan, serta memperkuat kapasitas aparatur pemerintah dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pembangunan manusia di Kota Jambi dapat berlangsung secara lebih inklusif dan berkelanjutan, serta mencerminkan keberhasilan otonomi daerah yang sejati.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, O. (2013). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 355–365.
- Anggi, A. A. S. (2022). Analisis Rasio Keuangan APBD untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Medan Tahun 2016-2020. *Akuntansi Prima*, 4(1), 104–115. <https://doi.org/10.34012/japri.v4i1.2614>
- Astuti, S., & Mispriyanti, M. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia Dengan Studi *Seminar Nasional Fakultas Ekonomi* <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/semnasfe/article/view/2096%0Ahttps://jurnal.untidar.ac.id/index.php/semnasfe/article/viewFile/2096/1157>
- Barus, E. N., Tarmizi, H., & . R. (2021). Analysis of Factors Affecting Human Development Index in the City of Binjai. *International Journal of Research and Review*, 8(4), 161–170. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20210422>

- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2019). Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. In *PT Rajagrafindo Persada*.
- Badan Pusat Statistik Kota Jambi Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2022.
- Badan Pusat Statistik Kota Jambi Indeks Pembangunan Manusia.
- Ghozali, I. (2016) Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harliyani, E. M., & Haryadi, H. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(3), 129–140. <https://doi.org/10.22437/ppd.v3i3.3514>
- Juliandi A, Irfan, Manurung S. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi. Medan: UMSU Press.
- Machmud, et al. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2), 1–13.
- Mauludin, W., & Dewi, R. M. (2020). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8(3), 116–121. <https://doi.org/10.26740/jupe.v8n3.p116-121>
- Norsain, N., & Rofik, M. (2022). Apakah Kinerja Keuangan Daerah Menggambarkan Kemiskinan Di Jawa Timur. *Media Mahardhika*, 20(2), 405–414. <https://doi.org/10.29062/mahardhika.v20i1.354>
- Prima, Y. A., Puspita, E., Kediri, K., Java, E., & Information, A. (2023). *Kilisuci International Conference on Economic & Business Vol. 1 No. 1, 2023 Analysis of the Human Development Index (HDI) With Regional Financial Ratios Approach*. 1(1), 171–178.
- Purnamawati, A., & Hudaya, J. B. (2020). *The Effects of Regional Financial Ratios on Human Development Index (An Empirical Study in All Districts / Cities in Central Java Province During 2012–2017)*. 145(Icebm 2019), 426–432. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200626.072>
- Qisthina, F. A., Khusaini, M., & Wahyudi, S. T. (2019). Analysis of Regional Financial Independence Towards Economic Growth and Human Development Index (Case Study : SWP Gerbangkertasusila Plus). *Wacana*, 22(1), 47–51.
- Rahma, F., Yunarsi, Wilda, & Dewi Yulianti. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 13–19. <https://doi.org/10.57151/jeko.v1i2.9>
- Ramadhanti, H., & Rahmi, D. (2022). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 – 2019. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(2), 480–487. <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i2.4626>
- Rianson Sihaloho, G. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2016-2020. *Journal of Islamic Accounting Competency*, 3(1), 86–99. <https://doi.org/10.30631/jisacc.v3i1.1191>
- Riksa Wibawa, G., & Arif, A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 3(2), 88–100. <https://doi.org/10.36423/jumper.v3i2.902>
- Rizkika, D. H., & Firmansyah, M. (2023). Analysis of Regional Government Financial Performance on the Human Development Index in West Nusa Tenggara Province. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 06(12), 5522–5530. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i12-11>
- SAIFRIZAL, M. (2022). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (Bpkd) Di Kabupaten Bireuen. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 2(3), 202–211.

<https://doi.org/10.51878/knowledge.v2i3.1561>

- Santoso, D. H., Arsyi, F., Anshari Clarissa, A., Setiawan, I. N., Kurniati, E., & Delyana, S. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia 2023* (Vol. 18).
- Sari, F. N., & Riharjo, I. B. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pemabanguann Manusia Pada Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(e-ISSN: 2460-0585), 1–16.
- Siregar, H. A. (2023). Aspek Kinerja Keuangan Daerah yang Berdampak Pada Pembangunan Manusia di Daerah Pemekaran. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 13(2), 157–167. <https://doi.org/10.37859/jae.v13i2.5530>
- Tikson, D. T. (2005). Teori Pembangunan di Indonesia, Malaysia dan Thailand. *Makassar: Inninnawa*, (2), 47.
- Winarni, E., Handayani, R., & Soleh, A. (2022). Analisis Hubungan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(1), 270. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i1.369>
- Zukhri, N. (2020). *Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal*. Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.213>
- Zulkarnain, Z. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Ipm Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 1(2), 11–18. <https://doi.org/10.30812/rekan.v1i2.922>
- .